

BESOK TIM PANITIA SELEKSI UMUMKAN HASIL SELEKSI ADMINISTRASI CALON SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU



Sumber gambar:

<https://www.cakaplah.com/berita/baca/123526/2025/05/20/besok-tim-pansel-umumkan-hasil-seleksi-administrasi-calon-sekdaprov-riau/#sthash.a9dUkAIt.dpbs>

Tim Panitia Seleksi (Pansel) Terbuka Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau tengah melakukan verifikasi administrasi berkas pelamar calon pejabat eselon I di lingkungan Pemprov Riau.

Setelah dilakukan verifikasi, selanjutnya tim pansel akan mengumumkan hasil seleksi administrasi calon Sekdaprov Riau, pada Rabu (21/5/2025) besok.

Dimana terdapat 10 pelamar yang mendaftar calon Sekdaprov Riau sejak penjarangan dibuka mulai 5-19 Mei 2025. Dari 10 pelamar, terdapat 5 peserta dari luar Provinsi Riau.

"Hari ini kita lakukan evaluasi administrasi. InsyaAllah sesuai dengan jadwal, hasil seleksi administrasi diumumkan besok Rabu 21 Mei 2025," kata Ketua Pansel Terbuka Pimpinan Tinggi Madya Sekdaprov Riau, Prof Dr Ilyas Husti, Selasa (20/5/2025).

Ditanya soal nama-nama calon Sekdaprov Riau yang mendaftar, Ilyas Husti mengatakan, nama-nama calon akan disampaikan saat pengumuman hasil seleksi administrasi.

"Besok kita sampaikan nama-namanya saat pengumuman hasil seleksi administrasi," sebutnya.

Diberitakan sebelumnya, 10 pelamar calon Sekdaprov Riau terdapat tujuh orang berasal dari luar instansi Pemprov Riau, dan sisanya tiga pelamar berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) internal Pemprov Riau.

Tujuh pelamar tersebut dari luar Pemprov Riau itu terdiri dari 1 orang dari Pemko Sawahlunto (Sumbar), 1 orang dari Pemko Jambi (Jambi), 1 orang dari Pemkab Lampung Selatan (Lampung), 1 orang dari Kementerian Kesehatan, 1 orang dari Pemko Batam (Kepri).

Kemudian dari 2 orang dari Pemkab Kuantan Singingi (Riau). Dengan begitu, terdapat 5 pelamar dari luar Provinsi Riau yang ikut berebut jabatan Sekdaprov Riau.

Sumber berita:

1. <https://www.cakaplah.com/berita/baca/123526/2025/05/20/besok-tim-pansel-umumkan-hasil-seleksi-administrasi-calon-sekdaprov-riau/#sthash.a9dUkAI.dpbs>, Besok Tim Pansel Umumkan Hasil Seleksi Administrasi Calon Sekdaprov Riau, 20 Mei 2025; dan
2. <https://www.derakpost.com/wow-hasil-seleksi-administrasi-jabatan-sekda-riau-akan-diumumkan-tanggal-21-mei-2025/>, Wow... Hasil Seleksi Administrasi Jabatan Sekda Riau Akan Diumumkan Tanggal 21 Mei 2025, 20 Mei 2025.

Catatan:

Asesmen atau lelang jabatan PNS diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah pengelolaan pegawai negeri sipil untuk menghasilkan pegawai negeri sipil yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok Jabatan tinggi pada instansi pemerintah. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki JPT.

Pengisian JPT secara Terbuka yang selanjutnya disebut Seleksi Terbuka adalah proses pengisian JPT yang dilakukan melalui kompetisi secara terbuka.

Jenjang JPT terdiri atas:

1. JPT Utama;
2. PYT Madya;
3. JPT Pratama.

JPT Utama, JPT Madya, dan JPT Pratama diisi dari kalangan PNS. Setiap PNS yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama untuk mengisi JPT yang lowong.

JPT utama dan JPT madya tertentu dapat diisi dari kalangan non-PNS dengan persetujuan Presiden yang pengisiannya dilakukan secara terbuka dan kompetitif serta ditetapkan dalam Keputusan Presiden.

JPT utama dan JPT madya tertentu dikecualikan untuk JPT utama dan JPT madya di bidang rahasia negara, pertahanan, keamanan, pengelolaan aparatur negara, kesekretariatan negara, pengelolaan sumber daya alam, dan bidang lain yang ditetapkan presiden.

Persyaratan untuk dapat diangkat dalam JPT dari kalangan PNS sebagai berikut:

1. JPT Utama:

- a. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
- b. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan;
- c. memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun;
- d. sedang atau pernah menduduki JPT madya atau JF jenjang ahli utama paling singkat 2 (dua) tahun;
- e. memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
- f. usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun; dan
- g. sehat jasmani dan rohani.

2. JPT Madya:

- a. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
- b. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan;
- c. memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat selama 7 (tujuh) tahun;
- d. sedang atau pernah menduduki JPT pratama atau JF jenjang ahli utama paling singkat 2 (dua) tahun;
- e. memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
- f. usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun; dan
- g. sehat jasmani dan rohani.

3. JPT pratama:

- a. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;

- b. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan;
- c. memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5 (lima) tahun;
- d. sedang atau pernah menduduki Jabatan administrator atau JF jenjang ahli madya paling singkat 2 (dua) tahun;
- e. memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
- f. usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun; dan
- g. sehat jasmani dan rohani.

Kompetensi Teknis diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis. Kompetensi Manajerial diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan. Kompetensi Sosial Kultural diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan. Standar Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural ditetapkan oleh Menteri berdasarkan usulan Instansi Pemerintah.

Persyaratan untuk dapat diangkat dalam JPT dari kalangan non-PNS sebagai berikut:

1. JPT Utama

- a. warga negara Indonesia;
- b. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah pascasarjana;
- c. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan;
- d. memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat 15 (lima belas) tahun;
- e. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pendaftaran;
- f. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara;
- g. memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
- h. usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun;
- i. sehat jasmani dan rohani; dan
- j. tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia atau pegawai swasta.

2. JPT Madya

- a. warga negara Indonesia;
- b. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah pascasarjana;

- c. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi Jabatan yang dibutuhkan;
- d. memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat 10 (sepuluh) tahun;
- e. tidak menjadi anggota/pengurus partai politik paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pendaftaran;
- f. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara;
- g. memiliki rekam jejak Jabatan, integritas dan moralitas yang baik;
- h. usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun;
- i. sehat jasmani dan rohani; dan
- j. tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pegawai swasta.

Pengisian JPT utama dan JPT madya di kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, lembaga nonstruktural, dan Instansi Daerah dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS sesuai dengan persyaratan dalam PP Nomor 11 Tahun 2017. Pengisian JPT utama dan JPT madya dilakukan pada tingkat nasional.

Pengisian JPT pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS sesuai dengan persyaratan dalam PP Nomor 11 Tahun 2017. Pengisian JPT pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif pada tingkat nasional atau antar kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau.